

**ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH
KOTA BENGKULU**



**Oleh :
Eni Yulianti
NPM.C1C109036**

**UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM EKSTENSI AKUNTANSI
2011**

**ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Melengkapi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar sarjana Ekonomi
Jurusan Ekstensi Akuntansi Universitas Bengkulu**

**Oleh :
Eni Yuliarti
NPM.C1C109036**

**UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM EKSTENSI AKUNTANSI
2011**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing

NIP. 19710913 199601 1 001

Ketua Program Ekstensi

NIP.19560103.198603.1.002
Syaiful Baehri, SE, M.Si

NIP.19560102 198603 1 002

Skripsi oleh **Eni Yuliarti** ini

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji pada hari Selasa, **25 Oktober 2011**

Bengkulu, 25 Oktober 2011

Dewan Penguji

Ketua Penguji

Baihaqi, SE, M.Si, Ak

NIP. 19700603 199900 1 003

Sekretaris

Dr. Fachruzzaman SE, MDM, Ak

NIP. 19710913 199601 1 001

Anggota II

Abdullah, SE, M.Si, Ak

NIP. 19680728 199802 1 001

Anggota III

Robinson SE, M.Si, Ak

NIP. 19760308 200003 1 003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu

Ridwan Nurazi, SE, M.S.c, Ak, Ph.D.

NIP. 19600915 198903 1 004

Ridwan Nurazi, SE, M.S.c, Ak, Ph.D.

NIP. 19600915 198903 1 004

ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA BENGKULU

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pemikiran penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri. Dan tidak terdapat sebagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulisnya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja atau tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila dikemudian hari terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah tulisan saya sendiri, berarti gelar sarjana dan ijazah oleh Universitas batal saya terima.

Bengkulu, Oktober 2011

Eni Yuliarti

MOTTO

- 👉 *Sekali mencoba jangan pernah berhenti untuk menyerah sekalipun mengalami kegagalan trus lakukan sampai menempuh keberhasilan.*
- 👉 *Keberhasilan tidak pernah luput dari niat dan semangat hidup dalam meraih keberhasilan.*
- 👉 *Belajarlah mengucapkan syukur dari hal-hal baik dalam hidupmu, belajarlah menjadi kuat dari hal-hal buruk di hidupmu.*
- 👉 *Keberanian diperlukan untuk berdiri dan berbicara. Keberanian juga diperlukan untuk duduk untuk mendengarkan.*
- 👉 *Miliki mimpi apapun dan jangan pernah ragu untuk berusaha mewujudkannya. Masa depan adalah milik mereka yang percaya pada keindahan impian.*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan ridho-mu ya allah aku berhasil menyelesaikan studi ku ini. Kebahagiaan ini tak ingin ku nikmati sendiri, dengan kerendahan hati ya allah limpahkan anugerah-mu kepda mereka yang telah menghantar keberhasilanku

Kupersembahkan karya kecilku ini kepada :

- ☺ *Kedua orang tuaku yang sangat ku sayangi, ungkapan kata yang tulus tak dapat menggantikan semua. Terima kasih untuk cinta, kasih sayang, doa, perhatian dan pengorbanan yang telah diberikan.*
- ☺ *Kedua adikku yang memotivasi aku untuk menjadi contoh yang baik bagi kalian.*
- ☺ *Kepada orang yang menyayangiku dan membantuku dikala aq mendapat kesulitan.*
- ☺ *Kepada teman-teman ku yang selalu member semangat dalam penyelesaian skripsi ini.*
- ☺ *Almamaterku*

THE ANALYSIS OF LOCAL REVENUE & EXPENDITURE MANAGEMENT OF BENGKULU MUNICIPALITY ABSTRACT

By

Eni Yulianti ¹⁾ and Dr. Fachruzzaman Hi Hanafi SE,MDM.Ak ²⁾

The study was conducted on one of the local government in the province of Bengkulu. The purpose of this study is to investigate and analyze the Bengkulu municipality management of revenue and expenditure budget performance during the period of 2007-2010 of Bengkulu city.

The data used are secondary data obtained from official documents and other source of coherent time data (time series) of the accountability report of head of the municipality of Bengkulu year 2007-2010 from which data are obtained at the Bengkulu city planning board (BAPPEDA). The method used to analyze this research is qualitative analysis descriptive. It is used explaining linkage usually listed in the form of tables and analyzing are based on data.

The results show that the performance of revenue local has not been because the local revenue of Bengkulu municipality is still very low on average 11%/year. Meanwhile, performance of government expenditure showed unfavorable result where total government spending/year are mostly allocated to direct spending. It shows that a larger share of total spending is allocated that are not directly related to the implementation of development program and activities.

¹⁾ Student

²⁾ Lecture Consuler

ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA BENGKULU

RINGKASAN

Penelitian dilakukan pada salah satu pemerintah daerah yang ada di Provinsi Bengkulu yaitu Pemerintah Kota Bengkulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan kinerja anggaran belanja pemerintah Kota Bengkulu selama periode 2007-2010.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi serta sumber- sumber lainnya berupa data runtut waktu (*time series*) yaitu Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2007-2010 yang datanya diperoleh pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kota di pemerintah Kota Bengkulu. Metode yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah metode dengan pendekatan kualitatif yaitu analisis deskriptif, dimana analisis deskriptif merupakan analisis dengan merinci dan menjelaskan secara panjang lebar keterkaitan data penelitian yang biasanya tercantum dalam bentuk tabel dan analisis didasarkan pada data di tabel tersebut.

Dari hasil pengolahan data yang diperoleh dalam penelitian dapat diketahui bahwa Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bengkulu, apabila dilihat pada kinerja pengelolaan pendapatan dan kinerja belanjanya menunjukkan hasil yang belum begitu baik dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah Kota Bengkulu masih sangat rendah rata-rata setiap tahunnya yaitu sebesar

11%. Sedangkan apabila dilihat pada kinerja belanja pemerintah Kota Bengkulu menunjukkan hasil yang kurang baik, dimana dari total belanja pemerintah Kota Bengkulu setiap tahunnya banyak dialokasikan pada belanja langsung. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari total belanja lebih besar di alokasikan untuk belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil' alamin penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkah rahmat dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bengkulu**” Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Fachruzzaman Hi Hanafi SE,MDM.Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Baihaqi, SE.M.Si.Ak Selaku Ketua Program Ekstensi Akuntasi Fakultas Universitas Bengkulu.
3. Bapak Dosen Penguji Bapak Robinson,SE,M.Si.AK dan Bapak Abdullah, SE,M.Si.AK dan Bapak Baihaqi, SE.M.Si.Ak
4. Seluruh Dosen-dosen Fakultas Ekonomi khususnya Prodi Akuntansi Universitas Bengkulu.
5. Semua teman-teman mahasiswa dan mahasiswi S1 Ekstensi Akuntansi Angkatan 2009
6. Semua pihak yang turut memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi pada penulis.

Semoga allah senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-nya kepada kita semua. penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan

kesalahan, untuk itu segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua.

Bengkulu, Oktober 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRACT.....	vii
RINGKASAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	5
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Keuangan Daerah.....	6
2.1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah.....	6
2.1.2 Pengelolaan Keuangan Daerah.....	7
2.2 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.....	8
2.2.1 Pengertian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).....	8
2.2.2 Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	11
2.3 Kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).....	25
2.4 Efisiensi dan	31

Efektivitas.....	
2.5 Kerangka Konseptual Penelitian.....	32
2.6 Kerangka Analisis.....	33
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Definisi Operasional.....	34
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	39
3.4 Metode Analisis.....	39
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Deskripsi Data.....	45
4.2 Perhitungan dan Analisis Kinerja Pengelolaan APBD.....	50
4.3 Pembahasan.....	68
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Keterbatasan Penelitian	74
5.3 Saran	74
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Kota Bengkulu.....	46
Tabel 4.2	Sumber-sumber PAD Kota Bengkulu Tahun 2007-2010.....	48
Tabel 4.3	Analisis <i>Varians</i> (Selisish) Pendapatan Pemerintah Kota Bengkulu 2007-2010.....	50
Tabel 4.4	Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2007-2010...	52
Tabel 4.5	Derajat Desentralisasi Daerah Kota Bengkulu Tahun 2007-2010.....	53
Tabel 4.6	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bengkulu.....	54
Tabel 4.7	Efektivitas Pajak Daerah Kota Bengkulu.....	55
Tabel 4.8	Derajat Kontribusi BUMD Tahun 2007-2010 Pemerintah Kota Bengkulu.....	56
Tabel 4.9	Analisis <i>Varians</i> (Selisih) Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun 2007-2010.....	57
Tabel 4.10	Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun 2007-2010.....	58
Tabel 4.11	Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Tidak Langsung.....	59
Tabel 4.12	Rasio Belanja Hibah Terhadap Total Belanja Tidak Langsung.....	59
Tabel 4.13	Rasio Belanja Bantuan Sosial Terhadap Total Belanja Tidak Langsung.....	60
Tabel 4.14	Rasio Belanja Bagi Hasil Terhadap Total Belanja Tidak Langsung....	61
Tabel 4.15	Rasio Belanja Bantuan Keuangan Terhadap Total Belanja Tidak Langsung.....	61
Tabel 4.16	Rasio Belanja Tidak Terduga Terhadap Total Belanja Tidak Langsung.....	62
Tabel 4.17	Rasio Belanja Pegawai Terhadap Belanja Langsung.....	64
Tabel 4.18	Rasio Belanja Barang dan Jasa Terhadap Belanja Langsung.....	64
Tabel 4.19	Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Langsung.....	65
Tabel 4.20	Rasio Belanja Langsung dan Tidak Langsung Terhadap Total Belanja	67
Tabel 4.21	Efisiensi Belanja Daerah.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

Gambar 2.2 Alur Dan Jadwal Penyusunan APBD

Gambar 2.3 Proses Penyusunan APBD

Gambar 2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar 2.5 Kerangka Analisis Penelitian

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2007
- Lampiran 2 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2007
- Lampiran 3 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2007
- Lampiran 4 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Tujuan Otonomi Daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antara daerah dan meningkatkan kualitas publik agar lebih efisien dan responsatif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik daerah masing-masing. Otonomi daerah menghasilkan dampak yang beragam bagi perekonomian daerah juga berpotensi menimbulkan resiko fiskal.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan yang luas, utuh dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan ini, pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi wewenang dan masyarakat. Dalam rangka pertanggungjawaban publik, Pemerintah Daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomi, efisiensi dan efektivitas (*value for money*) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang pada hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu. Artinya, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok

sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan ril dimasyarakat untuk suatu tahun tertentu. Dengan demikian alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik (PP Nomor 58 Tahun 2005).

Dalam pelaksanaan ekonomi daerah dan desentralisasi fiskal, kinerja pemerintah sangat penting untuk dilihat dan diukur. Keberhasilannya suatu pemerintah di era otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai ukuran kinerja ini memberikan gambaran yang lebih khusus terkait dengan kemampuan suatu daerah untuk selalu menggali potensi daerah guna meningkatkan anggaran pendapatan, yang akan berdampak pada kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan daerah. Dalam anggaran berbasis kinerja secara struktur meliputi anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. Pelaksanaan pada belanja daerah menjadi titik perhatian terutama sisi belanja membutuhkan kinerja yang lebih baik, transparan dan tepat sasaran. Selanjutnya untuk pelaksanaan ekonomi daerah yang baik, transparan dan tepat sasaran pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kota Bengkulu merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Bengkulu memiliki banyak potensi unggulan daerah yang dapat digali untuk dijadikan sumber pendapatan daerah. Potensi unggulan daerah Kota Bengkulu yaitu Pariwisata, jenis usaha tradisioanal, kelautan dan perikanan. Pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu digerakan oleh 2 (dua) sektor yaitu sektor perdagangan dan sektor jasa pemerintahan umum. Dalam struktur perekonomian Kota Bengkulu peranan sektor perdagangan yang

sangat dominan adalah Hotel dan Restoran. Hal ini terlihat dari relatif besarnya kontribusi sektor perdagangan untuk hotel dan restoran dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bengkulu atas dasar harga berlaku dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Sektor ini menempatkan urutan teratas dalam struktur perekonomian Kota Bengkulu. Data dalam "Bengkulu Dalam angka 2010" memperlihatkan bahwa nilai nominal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran pada tahun 2008 sebesar 1.431,24 Miliar Rupiah dan tahun 2009 sebesar 1.532 Miliar Rupiah, sedangkan kontribusinya dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bengkulu sebesar 36,91% untuk tahun 2008 dan 36,69% untuk tahun 2009. Penyumbang terbesar adalah sektor perdagangan. Hotel dan Restoran adalah Sub Sektor perdagangan besar dan eceran, nilai nominal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sub Sektor ini pada tahun 2008 mencapai sebesar 35,23% dan tahun 2009 mencapai 35% dari hasil total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) keseluruhan. Sedangkan untuk sektor jasa pemerintahan umum Nilai Nominal Pada tahun 2008 yang disumbangkan Sektor Jasa Pemerintahan Umum dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bengkulu mencapai 537,63 Miliar Rupiah dan tahun 2009 sektor ini mencapai 610 Milyar Rupiah. Secara persentase kontribusi sektor Jasa Pemerintahan Umum dalam sektor jasa-jasa adalah sebesar 13,87% untuk tahun 2008 dalam 14,62% untuk tahun 2009. (Bengkulu Dalam Angka 2010).

Menurut hasil pengamatan yang dilakukan sebelum melakukan penelitian bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu yang berasal dari potensi unggulan daerah, hasil dari sektor perdagangan dan sektor jasa pemerintahan umum mampu memberikan kontribusi yang besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akan tetapi sampai dengan saat ini laju roda pemerintahan Kota Bengkulu masih

bergantung pada Dana Perimbangan dari pemerintah pusat dan pada kenyataannya sumber penerimaan atau pendapatan terbesar di pemerintah Kota Bengkulu adalah Dana Perimbangan dari pemerintah pusat di karenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu masih sangat kecil.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bengkulu “**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan kinerja anggaran belanja Kota Bengkulu selama periode 2007-2010?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan kinerja anggaran belanja Kota Bengkulu selama periode 2007-2010.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Bagi pemerintahan, diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi bahan masukan, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- 2) Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat menjadi bahan referensi khususnya bagi peneliti selanjutnya yang berminat mengadakan penelitian terhadap masalah yang sama.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan dan analisis yang dilakukan lebih terarah maka penelitian ini hanya membahas mengenai kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan kinerja pengelolaan belanja. Dimana untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pendapatan akan melakukan penelitian tentang analisis *varians* pendapatan, analisis pertumbuhan pendapatan, analisis rasio keuangan dan apabila untuk menganalisis kinerja pengelolaan belanja akan dilakukan penelitian tentang analisis *varians* belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja dan analisis efisiensi belanja.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Keuangan Daerah

2.1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Dalam arti sempit, keuangan daerah yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan APBD. Oleh sebab itu keuangan daerah identik dengan APBD. Menurut Nataludin (2001) keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Menurut Mamesa dalam Halim (2004:18), keuangan daerah dapat diartikan sebagai “semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku”.

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut”. Hak dan kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan keuangan daerah.

Menurut Halim (2004:20), “Ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang

inventaris milik daerah. Sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)”.

Menurut peneliti menyimpulkan bahwa Keuangan Daerah adalah “semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban”

2.1.2 Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam ketentuan umum pada PP Nomor 58 tahun 2005, ”Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan daerah”. Pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini mengandung beberapa kepengurusan dimana kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan bendaharawan. Dalam pengelolaan anggaran/keuangan daerah harus mengikuti prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik. Pada Permendagri Nomor 25 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun anggaran 2010 menyatakan bahwa “APBD harus disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik, sebagai berikut : (a) partisipasi masyarakat, (b) pola pembangunan berkelanjutan, (c) pengarusutamaan gender, (d) tata pengelolaan yang baik, (e) pengurangan kesenjangan antarwilayah, (f) percepatan pembangunan daerah tertinggal, (g) desentralisasi dan otonomi daerah, serta (h) padat karya. Dengan adanya reformasi keuangan daerah terjadi perubahan mendasar pengelolaan keuangan daerah/anggaran daerah (APBD) yaitu perubahan dari *Traditional Budgeting* ke *Performace Budgeting*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Yuwono dkk, (2005:63-64):

Aspek utama *Budgeting Reform* adalah perubahan dari *Traditional Budgeting* ke *Performance Budgeting*. *Traditional Budgeting* didominasi oleh penyusunan anggaran yang bersifat *Line=Item* dan *Incremental*, proses penyusunan anggaran hanya didasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya. *Performance Budgeting* pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja. Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik.

Peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dan pengawasan untuk menjalankan semua urusan pemerintahan.

2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

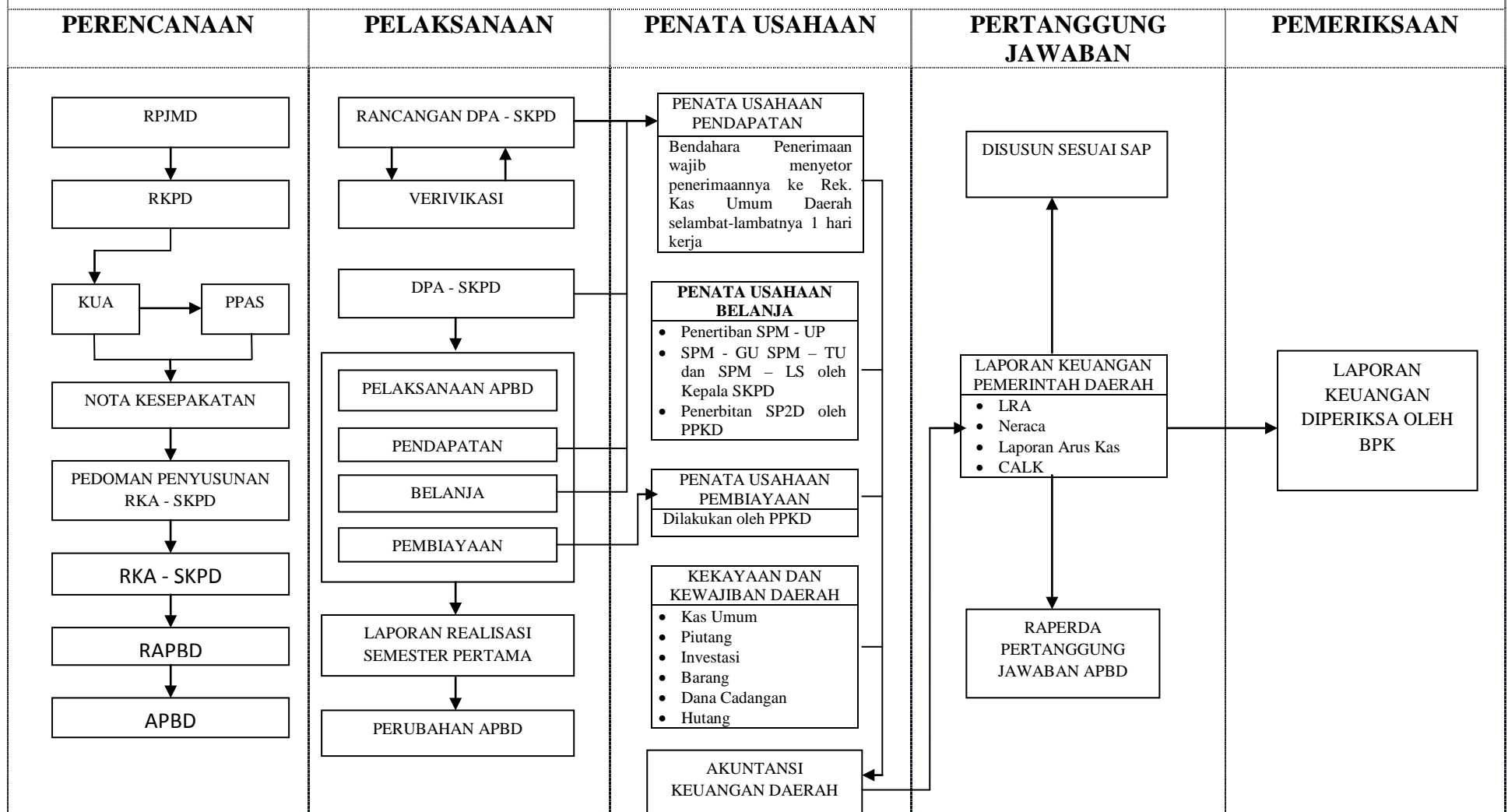
2.2.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mendefinisikan "APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu satu tahun yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD yang disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Rencana keuangan ini meliputi pendapatan dan pembiayaan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 " APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai 31 Desember pada tahun tertentu". Jadi dapat disimpulkan APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD menyajikan informasi rencana keuangan pemerintah daerah dalam satu periode tertentu. Sedangkan menurut Bastian (2006:189), "APBD merupakan rencana kerja pemda dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun dan

berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik”. Peneliti menyimpulkan bahwa APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Menurut Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 APBD mempunyai fungsi yaitu : (a) fungsi otorisasi, (b) fungsi perencanaan, (c) fungsi pengawasan, (d) fungsi alokasi, (d) fungsi distribusi, (e) fungsi stabilisasi.

SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



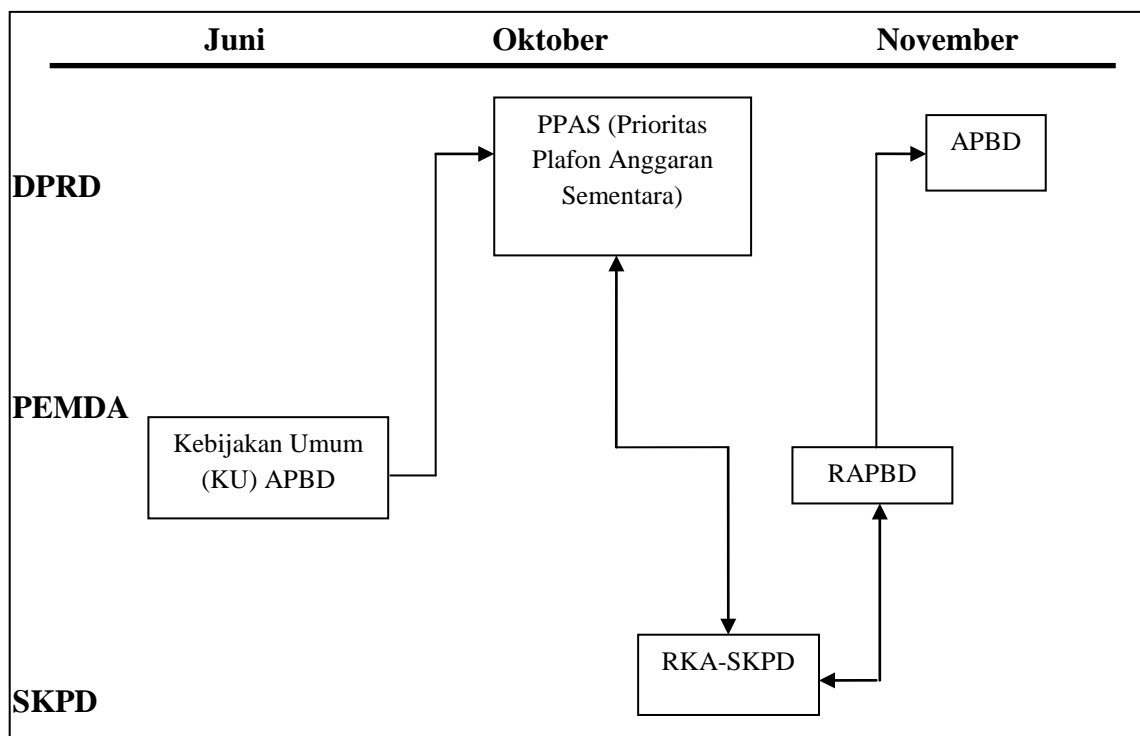
Sumber : Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

Gambar :2.1 Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

2.2.2 Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Proses penyusunan anggaran diawali dengan penetapan tujuan, target dan kebijakan, kesamaan persepsi antar berbagai pihak tentang apa yang akan dicapai dan keterkaitan tujuan dengan berbagai program yang akan dilakukan, sangat krusial bagi kesuksesan anggaran. Di tahap ini, proses distribusi sumber daya mulai dilakukan. Pencapaian konsensus alokasi sumber daya menjadi pintu pembuka bagi pelaksanaan anggaran seringkali melewati tahap yang melelahkan, sehingga perhatian terhadap tahap penilaian dan evaluasi sering diabaikan. Kondisi inilah yang nampaknya secara praktis sering terjadi (Bastian, 2006 :188).

Menurut Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003, skema alur proses dan jadwal penyusunan APBD adalah sebagai berikut :



Sumber : Undang-undang Nomor 17 tahun 2003

Gambar 2.2 Alur Proses dan Jadwal Penyusunan APBD

Dari gambar diatas dapat dilihat proses penyusunan APBD dimulai dengan Pemerintah Daerah menyampaikan Kebijakan Umum APBD tahun anggaran berikutnya

sejalan dengan Rencana Pemerintah Daerah sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan. Selanjutnya DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun Anggaran berikutnya. Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Berdasarkan Kebijakan Umum APBD, strategi dan plafon sementara yang telah ditetapkan pemerintah dan DPRD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) tahun berikutnya dengan pendekatan berdasarkan kinerja yang dicapai. Rencana dan anggaran disertai dengan perkiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. Rencana kerja dan anggaran disertai dengan perkiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. Rencana kerja dan anggaran selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rencana Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya. UU Nomor 17 Tahun 2003 tidak mengatur proses penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD. UU Nomor Tahun 17 Tahun 2003 menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah.

Setelah dokumen Rencana Perda mengenai APBD tersusun, Pemerintah Daerah mengajukan Rencana Peraturan Daerah tentang APBD tersebut disertai penjelasan dan

dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Berdasarkan Pasal 186 UU Nomor 32 Tahun 2004, rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perda Kabupaten/Kota dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD.

Pengambilan keputusan mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan oleh DPRD selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan Pemerintah Daerah, maka untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

Proses Penyusunan APBD dimulai dengan penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kedua dokumen tersebut kemudian dibahas bersama DPRD untuk menghasilkan sebuah Nota Kesepakatan KUA dan PPA. Berdasarkan Nota Kesepakatan tersebut, KDH menyampaikan Surat Edaran yang berisi Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang kemudian ditindaklanjuti oleh SKPD-SKPD dengan melakukan penyusunan RKA-SKPD. PPKD melakukan kompilasi RKA-SKPD menjadi Raperda APBD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama dengan DPRD sebelum diajukan dalam proses Evaluasi. Proses penetapan Perda APBD baru dapat dilakukan jika Mendagri/Gubernur menyatakan bahwa Perda APBD tidak bertentangan dengan

kepentingan umum dan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Dalam kasus tertentu dimana DPRD tidak mengambil keputusan bersama, KDH dapat menyusun Peraturan KDH tentang APBD.

a. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

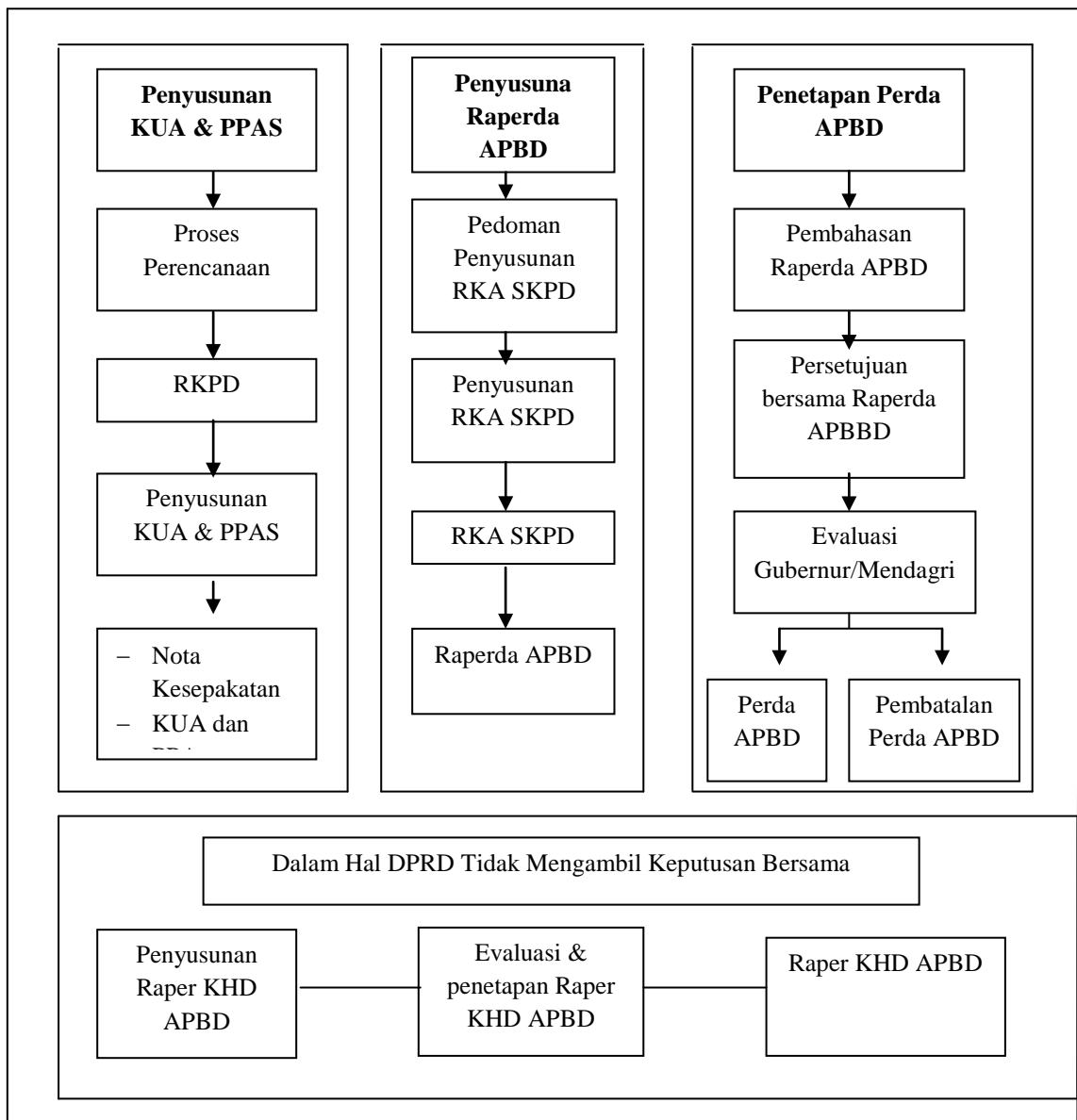
Kepala daerah berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan pedoman penyusunan APBD yang telah ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun menyusun rancangan kebijakan umum APBD, kebijakan umum APBD yang disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pendanaannya serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (Satu) tahun. Formulasi kebijakan anggaran harus memuat kejelasan mengenai tujuan dan sasaran yang akan dicapai ditahun mendatang dan sekaligus juga, harus menjadi acuan bagi proses pertanggung jawaban kinerja keuangan daerah pada akhir tahun anggaran. Laporan pertanggung jawaban itu biasa disebut dengan LKPI, sedangkan pada pelaksanaan operasional bersifat teknis, proses ini diserahkan pada pemerintah daerah. Penyusunan kebijakan umum APBD termasuk formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perenanaan operasional anggaran. Formulasi kebijakan anggaran berkaitan dengan analisis fiskal, sementara perencanaan operasional anggaran lebih ditekankan pada alokasi sumber daya pada pemerintah daerah. Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu, dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, pemerintah daerah bersama-sama DPRD menyusun KUA yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. Kebijakan anggaran yang dimuat dalam KUA selanjutnya menjadi dasar untuk penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Penyusunan KUA merupakan bagian dari

upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategi daerah (renstra). Sementara, tingkat pencapaian atau kinerja pelayanan yang telah direncanakan dalam satu tahun anggaran pada dasarnya, merupakan tahapan dan perkembangan dari kinerja pelayanan yang diharapkan dalam rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang.

Mekanisme Penyusunan Kebijakan Umum APBD termuat dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 34 memiliki mekanisme sebagai berikut :

- 1) Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD.
- 2) Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD tersebut berpedoman pada penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- 3) Kemudian Kepala Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya tersebut sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Untuk itu, Proses penyusunan APBD berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Sumber :Permendagri Nomor 59 Tahun 2007

Gambar 2.3 Proses Penyusunan APBD (Permendagri 59 Tahun 2007)

Secara teknis, proses penyusunan KUA adalah sebagai berikut :

- 1) Rancangan KAU memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintah daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pendanaan yang disertai dengan asumsi yang mendasari.

- 2) Rancangan KUA tersebut disusun oleh PPKD bersama pejabat perencana daerah dan pejabat SKPD lainnya sesuai dengan kebutuhan yang dikoordinasikan oleh sekretaris daerah yang selanjutnya disebut tim anggaran pemerintah daerah.
- 3) Rancangan KUA yang telah disusun disampaikan oleh sekretaris daerah selaku koordinator kepada kepala daerah paling lambat pada awal bulan Juni.
- 4) Rancangan kebijakan umum APBD disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD untuk selanjutnya disepakati KUA.

b. Klasifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Adapun struktur APBD berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 3(tiga) bagian yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

1) Pendapatan Daerah

Sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dikelompokkan sebagai berikut :

a) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber utama keuangan daerah yang membiayai kegiatan rutin dan pembangunan disamping

penerimaan lain berupa bagi hasil pajak atau bukan pajak, sumbangan dan bantuan serta pinjaman (Adi, 2006). Sedangkan Peneliti menyimpulkan bahwa Pendapatan Daerah merupakan semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas (a) Pajak daerah (b) Retribusi daerah (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah yaitu undang-undang nomor 4 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 dan Kepmendagri Nomor 35 Tahun 2002 tentang pajak daerah dan peraturan pemerintah nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah.

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dirinci menurut obyek pendapatan adalah sebagai berikut :

- (a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- (b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan
- (c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dirinci menurut obyek pendapatan adalah sebagai berikut :

- (a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (b) Jasa giro.
- (c) Pendapatan bunga
- (d) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
- (e) Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.
- (f) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- (g) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- (h) Pendapatan denda pajak.
- (i) Pendapatan denda restribusi.
- (j) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
- (k) Pendapatan dari pengembalian.
- (l) Fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- (m) Pendapatan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan
- (n) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

b) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :

- (a) Dana Bagi Hasil
 - Bagi hasil pajak.
 - Bagi hasil bukan pajak.

- (b) Dana Alokasi Umum, dan
- (c) Dana Alokasi Khusus.
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan yaitu terdiri dari :

- (a) Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
- (b) Dana Darurat dari pemerintahan dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.
- (c) Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota.
- (d) Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (e) Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah lainnya.

2) Belanja Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai nilai pengurangan kekayaan bersih. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian tertentu atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah termasuk dalam pengeluaran

daerah. Sedangkan Peneliti menyimpulkan bahwa belanja daerah adalah perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Menurut Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari :

a) Belanja pegawai

Belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil, pimpinan dan anggota DPRD, serta kepala daerah beserta wakilnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b) Bunga

Pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

c) Subsidi

Bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

d) Hibah

Hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah daerah.

e) Belanja bagi hasil

Dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Provinsi kepada kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

f) Bantuan keuangan

Bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari Provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan.

g) Belanja tidak terduga

Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam.

b. Belanja langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari :

a) Belanja pegawai

Belanja untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan.

b) Belanja barang dan jasa

Pengeluaran pembelian atau pengadaan barang atau pemakaian jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

c) Belanja modal

Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti tanah, mesin, gedung dan sebagainya.

3) Pembiayaan

Menurut Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari :

a. Penerimaan Daerah

a) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu berasal dari sisa anggaran tahun lalu yang mencakup penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga yang sampai akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana kegiatan lanjutan, dan semua pelampauan atas penerimaan daerah.

b) Pencairan dana cadangan

Pencairan dana cadangan berasal dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dana alokasi umum, pinjaman daerah atau penerimaan lain

yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- c) Penerimaan pinjaman daerah berasal dari kegiatan meminjam dana termasuk menerbitkan obligasi.

- d) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

Berasal dari diterimanya kembali sejumlah pinjaman yang telah diberikan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya.

- e) Penerimaan piutang daerah

Penerimaan piutang daerah berasal dari pelunasan piutang pihak ketiga seperti penerima piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga keuangan bank atau bukan bank, serta penerimaan piutang lainnya.

- f) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari penjualan perumahan milik daerah, dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau hasil divestasi penyertaan modal penerimaan daerah.

- g) Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

- (a) Pembentukan dana cadangan

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relative besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana yang dialokasikan sebagai dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan

kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dan cadangan.

(b) Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah)

Merupakan sumber pembiayaan yang berupa kegiatan penyertaan modal (investasi).

(c) Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihutang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

(d) Pemberian Pinjaman Daerah

Akun pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat atau pusat lainnya.

2.3 Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Menurut Bastian (2006: 274), “Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi”. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau

tujuan yang ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil, manfaat, dan dampak. Penulis menyimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.

Menurut Mahmudi (2007) Analisis kinerja anggaran dapat dilakukan dalam 2 (Dua) bagian yaitu :

a. Analisis Kinerja Pendapatan

Analisis terhadap kinerja pendapatan daerah secara umum terlihat dari realisasi pendapatan dengan anggarannya, apabila realisasi melampaui anggaran (target) maka kinerjanya dapat dinilai baik. Penilaian kinerja pendapatan pada dasarnya tidak cukup hanya melihat apakah realisasi pendapatan daerah telah melampaui target anggaran, namun perlu dilihat komponen pendapatan yang lebih berpengaruh.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran kita dapat melakukan analisis pendapatan dengan cara :

a) Analisis *Varians* (Selisih) Anggaran Pendapatan

Analisis *varians* anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Biasanya selisih anggaran sudah diinformasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan pemerintah daerah. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja pendapatan.

Pada prinsipnya, anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan (target anggaran). Sebaliknya apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik. Apabila target pendapatan dapat dicapai bahkan terlampaui, maka hal itu tidak terlalu mengejutkan karena memang seharusnya demikian. Selisih lebih realisasi pendapatan merupakan selisih yang diharapkan, sedangkan selisih kurang merupakan selisih yang tidak diharapkan.

b) Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecenderungannya (trend) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu menunjukkan terjadi penurunan kinerja pendapatan. Pertumbuhan pendapatan daerah diharapkan dapat mengimbangi laju inflasi. Selain mempertimbangkan faktor inflasi, penetapan target pertumbuhan juga harus mempertimbangkan asumsi anggaran yang lain, misalnya kurs rupiah, harga minyak dan sebagainya.

c) Analisis Rasio keuangan

(a) Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan kepada pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

(b) Rasio Kemandirian Keuangan

Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

(c) Rasio Efektifitas Pajak Daerah

Rasio efektifitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektifitas pajak daerah dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 atau 100%.

(d) Derajat Kontribusi BUMD

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah.

b. Analisi Kinerja Belanja

Analisi belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif. sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari keperluan yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Kinerja anggaran belanja daerah dinilai baik apabila realisasi belanja lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan, yang hal itu menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Dalam belanja daerah penting juga dianalisis keserasian belanja karena hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilisasi.

Berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran, kita dapat melakukan analisis anggaran belanja dengan daerah :

a) Analisis *Varians* Belanja

Analisis *varians* merupakan analisi terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau persentase. Kinerja pemerintah daerah dinilai baik apabila jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan, maka hal itu mengidentifikasi adanya kinerja anggaran yang kurang baik.

b) Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun positif atau negatif. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs

rupiah, perubahan jumlah cukup layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang.

c) Analisis Kecerassian Belanja

Rasio ini menggambarkan bagaimana peristiwa daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Analisis keserasian belanja antara lain berupa :

- (a) Analisis belanja rutin dan belanja pembangunan terhadap total belanja
- (b) Analisis belanja operasi terhadap total belanja
- (c) Analisis belanja modal terhadap total belanja
- (d) Analisis belanja langsung dan belanja tidak langsung

d) Analisis Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang digunakan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dinggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah relative lebih efisien disbanding tahun lalu. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100 %. Sebaiknya jika melebihi 100 % maka mengidentifikasikan terjadinya pemborosan anggaran.

Dengan melihat kinerja Pendapatan dan Kinerja Belanja, maka dapat dinilai kinerja anggaran APBD secara umum. Jika semua kinerja tersebut menunjukkan

pencapaian angka yang sudah ditargetkan, maka dikatakan kinerja anggaran APBD adalah baik.

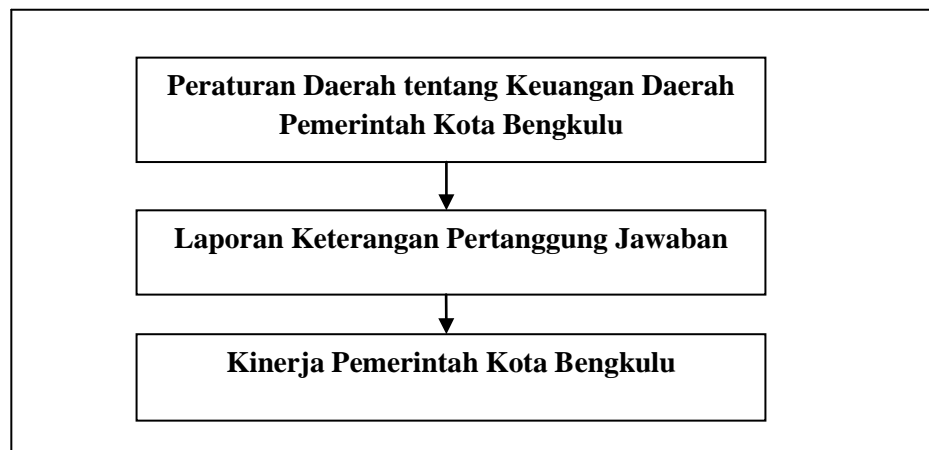
2.4 Efektivitas dan Efisiensi

Menurut Abdurahmat (2003:92) Efektivitas yaitu suatu pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Sedangkan Siagian (2001:24) Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994:219) menyebutkan efisiensi merupakan ketepatan cara (usaha dan kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya dan kegunaannya. Dalam pengertian ekonomis, efisiensi adalah dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki (input) yang sekecil mungkin untuk memperoleh keluaran (output) tertentu atau dengan input (sumber daya dan dana) tertentu dalam mencapai output yang maksimal (Sukamdiyo, 1996:11). Peneliti menyimpulkan bahwa Efektivitas merupakan pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Sedangkan Efisiensi merupakan penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum.

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian.

Berikut ini dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian analisis yang dijadikan dasar pemikiran analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

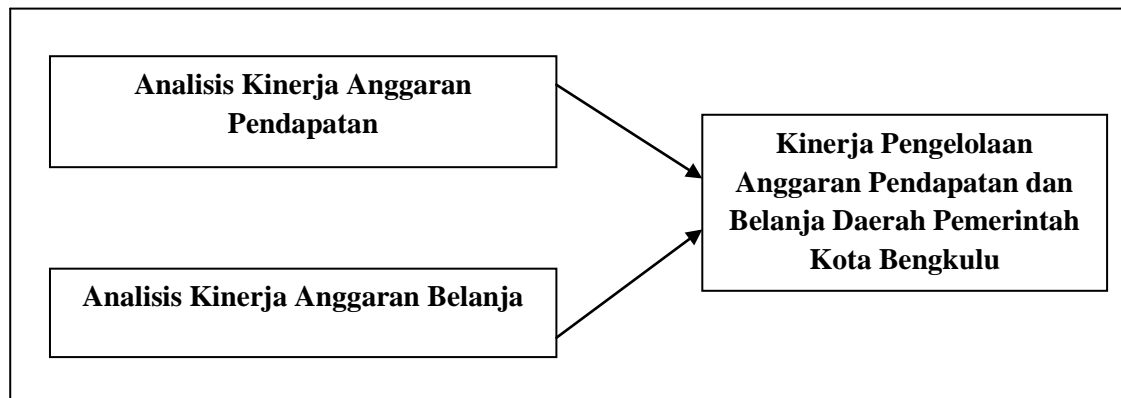


Gambar 2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Untuk melihat bagaimana Kinerja Pemerintah Kota Bengkulu maka pengamatan berawal dari pemerintahan itu sendiri, dimana dalam pemerintah ini telah melakukan serangkaian proses kerja berdasarkan peraturan-peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Dari serangkaian proses kerja yang mengikuti aturan dalam peraturan pemerintah, maka hasil kerja tersebut nantinya dapat dilihat dari Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ini di buat oleh pemerintah Kota Bengkulu dalam satu tahun. Dimana laporan tersebut berisikan tentang kebijakan pemerintah daerah, kebijakan umum keuangan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam satu tahun. setelah laporan ini dibuat maka dapat dilihat bagaimana Kinerja Pemerintah Kota Bengkulu.

2.6 Kerangka Analisis

Berikut ini dapat digambarkan kerangka analisis yang dijadikan dasar pemikiran peneliti dalam penelitian ini.



Gambar 2.5 Kerangka Analisis Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Menurut Erlina (2007:64), “ Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh oleh peneliti dari subjek beberapa individu, organisasional, industri atau perspektif lain”. Menurut Sugiyono (2007:11), “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variabel atau lebih independen tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel”.

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas hal yang didefinisikan oleh peneliti mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian. Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kinerja keuangan daerah merupakan gambaran keluaran/hasil kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran yang menjadi hak dan kewajiban pemerintah Kota Bengkulu dalam rangka penyelenggaraan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya sebagai bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- b. Analisis *varians* adalah sebuah metode untuk memeriksa apakah ada hubungan antara dua atau lebih set data. Anda dapat menentukan apakah ada hubungan antara set data dengan melakukan analisis *varians*.
- c. Derajat desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintah pusat/provinsi kepada pemerintah Kota

Bengkulu, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintah Kota Bengkulu yang dilimpahkan.

- d. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik pemerintah Kota Bengkulu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.
- e. Pendapatan Daerah adalah Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum pemerintah Kota Bengkulu, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kota Bengkulu.
- f. Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun $t-1$ merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dari pemerintah Kota Bengkulu pada tahun sebelumnya dari tahun yang berkenaan atau yang ditentukan.
- g. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun t adalah sumber pendapatan yang diperoleh dari dalam daerah yang mana pemungutan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah Kota Bengkulu pada tahun berkenaan atau pada tahun anggaran berjalan sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun $t-1$ merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dari dalam daerah yang mana pemungutan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah Kota Bengkulu pada tahun lalu.
- h. Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun t merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dari Kota Bengkulu pada tahun berkenaan atau tahun yang ditentukan.

- i. Derajat Kontribusi BUMD adalah tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan pemerintah Kota Bengkulu.
- j. Rasio efektivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah Kota Bengkulu dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah Kota Bengkulu.
- k. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah Kota Bengkulu dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah yang diukur dengan membandingkan PAD terhadap jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat/ provinsi serta pinjaman. Kemandirian keuangan pemerintah Kota Bengkulu
- l. Belanja daerah adalah belanja yang terhitung dalam APBD yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Belanja tahun t merupakan belanja yang penyelenggaraanya dilakukan pada tahun berkenaan atau pada tahun berjalan sedangkan belanja tahun $t-1$ merupakan belanja yang penyelenggaraannya dilaksanakan pada tahun lalu.
- m. Efektifitas keuangan daerah menggambarkan kinerja pemerintah Kota Bengkulu dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target penerimaan PAD.
- n. Realisasi Pendapatan adalah perwujudan perolehan pendapatan dalam kurun waktu satu tahun.

- o. Realisasi Pajak Daerah adalah perwujudan perolehan pajak dalam kurun waktu satu tahun.
- p. Realisasi Belanja merupakan perwujudan pelaksanaan belanja dalam kurun waktu satu tahun.
- q. Target Pajak Daerah adalah pajak yang ingin dicapai pada tahun berjalan atau tahun yang ditentukan sesuai dengan rincian anggaran target pajak yang telah ditetapkan.
- r. Penerimaan Laba BUMD adalah penerimaan laba usaha yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Daerah seperti pada Pemerintah Kota Bengkulu penerimaan BUMD banyak didapat dari Bank Pemerintah Daerah (BPD).
- s. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
- t. Belanja Pegawai adalah Belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil, pimpinan dan anggota DPRD, serta kepala daerah beserta wakilnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. dipemerintah Kota Bengkulu belanja pegawai meliputi pembayaran gaji dan tunjangan, biaya asuransi kesehatan dan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil.
- u. Belanja Hibah adalah bantuan yang tidak mengikat/tidak terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah daerah. Belanja Hibah yang telah dianggarkan dalam APBD Kota Bengkulu diperuntukan kepada badan, lembaga, organisasi swasta serta belanja yang diperuntukan bagi kelompok masyarakat atau perorangan.

- v. Belanja Bantuan Sosial merupakan salah satu jenis belanja tidak langsung dalam APBD. Artinya, pengalokasian sumber daya ke dalam belanja ini tidak didasarkan pada target kinerja-kinerja yang ingin dicapai oleh SKPD. Belanja Bantuan Sosial yang telah dianggarkan dalam APBD Kota Bengkulu untuk pemberiaan bantuan sosial untuk kelompok masyarakat dan bantuan bagi organisasi masyarakat.
- w. Belanja Bantuan Keuangan yang ada di Kota Bengkulu penggunaannya diarahkan untuk membiayai perangkat daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat serta bantuan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi masyarakat dan organisasi profesi.
- x. Belanja Tidak Terduga dalam pos Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Bengkulu dipergunakan dan diarahkan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan yang sulit diprediksi kejadiannya terutama berkaitan dengan kejadian bencana alam dan bencana sosial yang pelaksanaan kewenangan telah menjadi urusan pemerintah Kota Bengkulu.
- y. Belanja Barang dan Jasa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bengkulu di pergunakan untuk pemenuhan sarana prasarana, barang- barang yang dipakai habis dan pemenuhan barang yang akan menunjang kegiatan dalam menjalankan fungsi pemerintahan.
- z. Belanja Modal dalam APBD Kota Bengkulu digunakan untuk pembangunan fasilitas umum, pembangunan dan pemeliharaan jalan, irigasi, gedung pemerintah, peralatan perkantoran.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi serta sumber- sumber lainnya berupa data runtut waktu (*time series*) yaitu Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2007-2010 yang datanya diperoleh pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(Bappeda) kota di pemerintah Kota Bengkulu.

3.4 Metode Analisis

Metode yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah metode dengan pendekatan kualitatif yaitu analisis deskriptif. Menurut Mahmudi (2007) analisis deskriptif merupakan analisis dengan merinci dan menjelaskan secara panjang lebar keterkaitan data penelitian yang biasanya tercantum dalam bentuk tabel dan analisis didasarkan pada data di tabel tersebut. Adapun cara pehitungannya adalah sebagai berikut :

1) Analisis Kinerja Pendapatan

Dalam melakukan analisis pendapatan dapat dilakukan dalam bentuk rasio dengan menggunakan rumus :

a. Analisis *Varians* (Selisih) Pendapatan

Analisis *varians* anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut :

Analisis <i>Varians</i> Pendapatan	=	$\frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}}$	X 100 %
------------------------------------	---	--	---------

b. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negative tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecenderungannya (*trend*) meningkat.

Pertumbuhan PD Tahun t	$\frac{\text{PAD Tahun t} - \text{PAD Tahun t-1}}{\text{PAD Tahun t-1}} \times 100 \%$
------------------------	--

c. Analisis Rasio Keuangan

(a) Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan kepada pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan.

Rasio Derajat Desentralisasi	$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$
------------------------------	--

(b) Rasio Kemandirian Keuangan

Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan,

Rasio Kemandirian Keuangan	$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer Pusat + Pinjaman}} \times 100 \%$
----------------------------	---

(c) Rasio Efektifitas

Rasio efektifitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan.

Rasio Efektifitas	$= \frac{\text{Realisasi Pajak daerah}}{\text{Target pajak Daerah}} \times 100 \%$
-------------------	--

(d) Derajat Kontribusi BUMD

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah.

Derajat Kontribusi BUMD	$= \frac{\text{Penerimaan Laba BUMD}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100 \%$
-------------------------	---

2) Analisis Kinerja Belanja

a. Analisis *Varians* (Selisih Belanja)

Anlisis varians merupakan analisi terhadap perbedaan atau selisih anatar realisasi belanja dengan anggaran.

Analisis <i>Varians</i> Belanja	$= \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100 \%$
---------------------------------	--

b. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun positif atau negative.

Pertumbuhan PD Tahun t	$= \frac{\text{Belanja Tahun t} - \text{Belanja Tahun t-1}}{\text{Belanja Tahun t-1}} \times 100 \%$
------------------------	--

c. Analisis Keserasian Belanja

Analisis Keserasian Belanja menggambarkan bagaimana peristiwa daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Adapun rumus perhitungan analisis keserasian belanja adalah sebagai berikut :

- a) Analisis belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga terhadap total belanja tidak langsung.

	Total Belanja Pegawai	
Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Tidak Langsung	$= \frac{\quad}{\quad}$	X 100 %
	Total Belanja Tidak Langsung	

	Total Belanja Hibah	
Rasio Belanja Hibah terhadap Total Belanja Tidak Langsung	$= \frac{\quad}{\quad}$	X 100 %
	Total Belanja Tidak Langsung	

	Total Belanja Bantuan Sosial	
Rasio Belanja Bantuan Sosial terhadap Total Belanja Tidak Langsung	$= \frac{\quad}{\quad}$	X 100 %
	Total Belanja Tidak Langsung	

	Total Belanja Bagi Hasil	
Rasio Belanja Bagi Hasil terhadap Total Belanja Tidak Langsung	$= \frac{\quad}{\quad}$	X 100 %
	Total Belanja Tidak Langsung	

Rasio Belanja Bantuan keuangan terhadap Total Belanja Tidak Langsung	$= \frac{\text{Total Belanja Bantuan Keuangan}}{\text{Total Belanja Tidak Langsung}} \times 100 \%$
--	---

Rasio Belanja Tidak Terduga terhadap Total Belanja Tidak Langsung	$= \frac{\text{Total Belanja Tidak Terduga}}{\text{Total Belanja Tidak Langsung}} \times 100 \%$
---	--

b) Analisis Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Modal terhadap total Belanja Langsung

Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Langsung	$= \frac{\text{Total Belanja Pegawai}}{\text{Total Belanja Langsung}} \times 100 \%$
---	--

Rasio Belanja Barang dan Jasa terhadap Total Belanja Langsung	$= \frac{\text{Total Belanja Barang dan Jasa}}{\text{Total Belanja Langsung}} \times 100 \%$
---	--

Rasio Belanja Modal terhadap total Belanja Langsung	$= \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Langsung}} \times 100 \%$
---	--

d. Analisis Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Langsung Terhadap Total Belanja

Rasio langsung terhadap total Belanja	$= \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100 \%$
---------------------------------------	--

Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap total Belanja	$= \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja}} \times 100 \%$
---	--

e. Analisis Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang digunakan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut tetapi relatif.

Rasio Efisiensi Belanja	$= \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100 \%$
-------------------------	--